

PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Jakarta, 13 Maret 2025

HASIL EVALUASI TPN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

HASIL EVALUASI ZI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

NO	HASIL EVALUASI	JUMLAH UNIT KERJA	RINCIAN	
			WBK	WBBM
1.	Unit/satuan kerja diusulkan	27	18	9
2.	Unit/satuan kerja mendapat predikat	3	2	1
3.	Unit/satuan kerja belum memenuhi kriteria	24	16	8
4.	Tingkat keberhasilan	11,1%		

3 Unit Kerja yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM tahun 2024

WBK: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Sorong

WBK: Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Makassar

WBBM: Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Kalimantan Berau

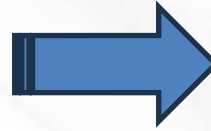
1. Agar memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 pada saat pembangunan Zona Integritas dan pengajuan ke Tim Penilai Nasional (TPN) sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas unit kerja;
2. Agar memastikan enam area perubahan berjalan secara efektif sehingga dapat membantu peningkatan sasaran pembangunan Zona Integritas, yaitu meningkatkan integritas, pelayanan dan kinerja;
3. Memastikan inovasi yang sudah dilaksanakan oleh unit kerja dilakukan monev atas implementasinya untuk memastikan inovasi berdampak pada peningkatan kinerja;
4. Agar Tim Penilai Internal (TPI) secara aktif dan berkesinambungan melakukan pembinaan dan fasilitasi terkait peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja yang sedang melakukan pembangunan Zona Integritas;
5. Agar unit kerja yang mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dapat menjadi unit percontohan bagi unit kerja lain di Kementerian Perhubungan.

Rincian hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas setiap unit/satuan kerja dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun yang sama dengan pengusulan evaluasi Zona Integritas tahun 2024.

CATATAN KEMENHUB – SELEKSI ADMINISTRASI

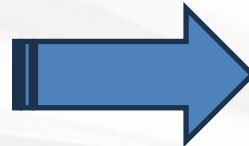
Laporan Survei Mandiri
belum ada.

Laporan Survei Mandiri
belum mencantumkan data
responden dengan lengkap
(nama dan nomor telfon
responden)



1. Unit kerja perlu melampirkan Laporan Survei Mandiri sampai TW II pada tahun pengajuan
2. Perlu menyajikan data nama dan nomor telfon responden untuk memastikan validitas survei

Nilai total akhir pada LKE
belum memenuhi nilai
minimal kriteria untuk
pengajuan WBK



Perlu memastikan nilai total
dan nilai per area pada LKE
sudah memenuhi nilai
minimal

CATATAN KEMENHUB – ANALISIS DOKUMEN

Unit kerja belum menyampaikan dokumen terbaru,
Misalnya: Laporan LHKPN-LHKASN, SOP dan Laporan Pengaduan Masyarakat

Rata-rata capaian unit kerja yang disampaikan pada Laporan Kinerja masih dibawah 100%

Unit kerja belum melakukan monev terhadap rencana aksi pembangunan ZI

Unit kerja belum menyusun Rencana Tindak Pengendalian Resiko dan laporan mitigasi resiko

Unit kerja belum menyusun laporan atas penanganan benturan kepentingan

Unit kerja belum menyampaikan dokumen terkait akuntabilitas dengan lengkap, seperti Renstra unit kerja dan pohon kinerja/*cascading* kinerja

CATATAN KEMENHUB – WAWANCARA

Penerapan Sistem Pengendalian Intern

- Unit kerja belum dapat mengidentifikasi resiko dan menetapkan Rencana Tindak Pengendalian yang dapat menurunkan tingkat resiko dengan tepat

Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

- Unit kerja belum melakukan rekapitulasi, monev, dan tindaklanjut atas pengaduan yang disampaikan melalui media daring maupun luring

Penanganan Benturan Kepentingan

- Unit kerja belum dapat mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dan menetapkan strategi yang tepat dalam penanganan benturan kepentingan

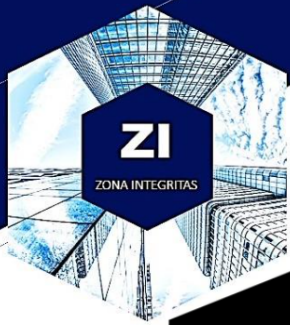
Inovasi Pelayanan Publik

- Inovasi yang disampaikan dalam pengajuan masih dalam proses pengembangan, belum diimplementasikan dan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh stakeholder sehingga belum terlihat dampak/perbaikan yang terukur

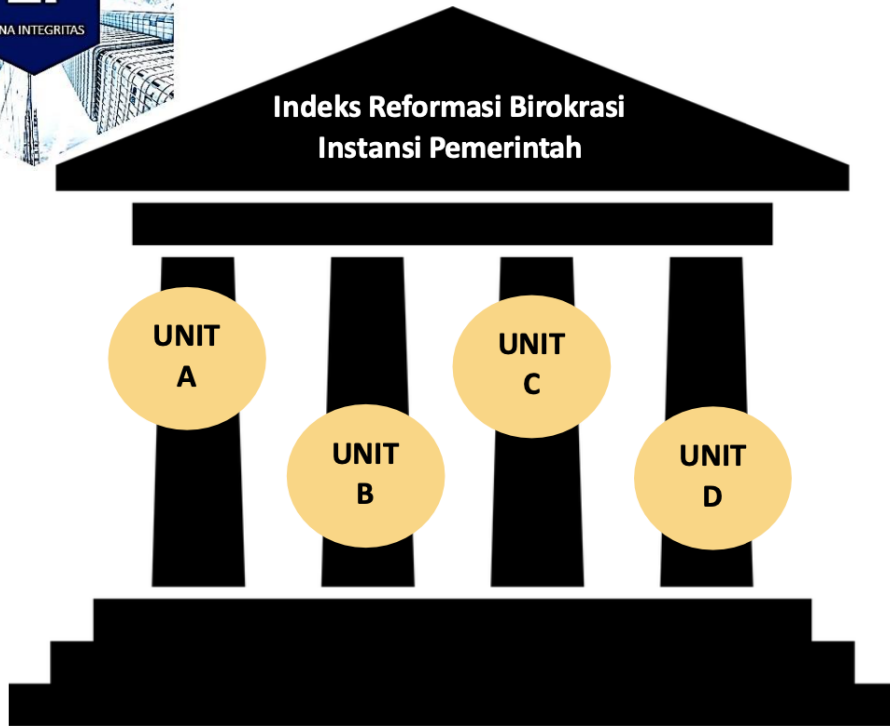
CATATAN UMUM KEMENHUB – VERIFIKASI LAPANGAN

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	CATATAN YANG SERING MUNCUL	REKOMENDASI
1	Digitalisasi Administrasi (e-Gov)	Informasi pelayanan dalam website/media sosial unit kerja pemberi layanan seringkali sulit diakses atau sulit dipahami oleh masyarakat, serta tidak diperbaharui.	Memastikan informasi terkait layanan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, terutama stakeholder layanan.
2	Pelayanan	• Belum ada kesesuaian pelaksanaan layanan dengan SOP. • Belum terdapat kompensasi layanan atas janji layanan sesuai SOP yang tidak terpenuhi. • Belum maksimalnya pelaksanaan SKM sampai ke individu pemberi layanan. • Masih kurangnya informasi terkait alur layanan di ruang pelayanan luring.	• Memastikan alur layanan dilaksanakan sesuai SOP. • Membuat kompensasi layanan atas janji layanan sesuai SOP. • Memaksimalkan pelaksanaan SKM sampai ke individu pemberi layanan. • Memastikan informasi terkait alur layanan bisa diketahui dan diakses dengan mudah oleh semua pengguna layanan.
3	Pengaduan	Masih terdapat pengaduan yang berulang dari masyarakat dan belum ditindaklanjuti.	Melakukan monev dan tindaklanjut atas seluruh pengaduan masyarakat yang masuk dari semua media baik melalui daring maupun luring.
4	Inovasi	• Belum terlihat dampak nyata dari inovasi layanan saat pengajuan WBK. • Belum terlihat adanya peningkatan inovasi layanan dari pengajuan WBK ke WBBM.	• Perlu disampaikan bukti/dampak dari adanya inovasi layanan, dapat berupa perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pembangunan WBK. • Perlu adanya peningkatan inovasi layanan dari pengajuan WBK ke WBBM yang menjadi unggulan dan bisa direplikasi oleh unit kerja yang sejenis.
5	Survei	Survei tidak valid.	Perlu memastikan bahwa pengisi survei layanan adalah benar-benar pengguna layanan asli.

**PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM
BERDASARKAN PERMENPANRB NO. 5 TAHUN 2024
SEBAGAI PERUBAHAN
ATAS PERMENPANRB NO. 90 TAHUN 2021**



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



UNIT PERCONTOHAN

1. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis (pendukung core layanan utama di Instansi) dalam melakukan pelayanan publik khususnya dalam mewujudkan tujuan organisasi
2. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi terutama dalam menjadi percontohan unit lain sehingga memberikan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi



Predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini diberikan kepada



01

Unit-unit kerja pelayanan yang strategis



02

Pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat membangun WBK/WBBM



03

Telah melakukan berbagai “perbaikan” secara nyata, sistematis dan berkelanjutan



04

Memiliki orientasi pada peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik



05

Dapat menjadi *role model* dalam menularkan semangat perubahan tata kelola kepada unit kerja lainnya



PENGUSULAN ZI

	WBK	WBBM
Syarat Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian
	Predikat SAKIP	Min. B
	Indeks RB	☐ Min CC untuk Pemda ☐ Min B untuk K/L
	Maturitas SPIP	Min. Level 3
Syarat Tingkat unit kerja/satuan kerja	Karakteristik	☐ Merupakan <i>core</i> layanan utama dari instansinya ☐ Memberikan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ttg kualitas birokrasi
	Kepatuhan	☐ Penyelesaian TLHP dari APIP/BPK telah 100% ☐ LHKASN dan LHKPN telah 100%
	Periode Pembangunan	Telah melakukan pembangunan WBK Min. 1 Tahun
	Predikat SAKIP Internal	Min. B



PENETAPAN WBK/WBBM

Syarat	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Min. Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Min. per area Pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen hasil "Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel"	Min. 18,25	Min. 19,50
Nilai sub-Komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	Min. 15,75 (Indeks 3,60)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	Min. 2,50	Min. 3,75
Nilai Komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima"	Min. 14,00 (Indeks 3,20)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)

PERMENPANRB 5 TAHUN 2024

CLEARANCE: KPK, ORI, BIN

NILAI MINIMUM PER AREA PENGUNGKIT

1
2

AREA PERUBAHAN	PEMENUHAN	REFORM	TOTAL BOBOT	NILAI MINIMAL MENUJU WBK	NILAI MINIMAL MENUJU WBBM
SYARAT NILAI MINIMUM PER AREA PERUBAHAN				60%	75%
1. Manajemen Perubahan	4	4	8	4,8	6
2. Penataan Tatalaksana	3,5	3,5	7	4,2	5,25
3. Penataan Sistem Manajemen SDMA	5	5	10	6	7,5
4. Penguatan Akuntabilitas	5	5	10	6	7,5
5. Penguatan Pengawasan	7,5	7,5	15	9	11,25
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5	10	6	7,5
JUMLAH	30	30	60	36	45
NILAI MINIMAL PENGUNGKIT				40	48

CATATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

TIDAK PAHAM LAYANAN

KOMITMEN PIMPINAN RENDAH

PEMAHAMAN TENTANG ZI MASIH RENDAH

KINERJA BELUM MENJADI DASAR

INOVASI BELUM SESUAI

CONTINUOUS IMPROVEMENT RENDAH

Unit/satuan kerja tidak memahami core business/ layanan utamanya

Komitmen pimpinan dalam pembangunan Zona Integritas suatu unit kerja masih rendah

Unit kerja belum bisa menggambarkan dampak/hasil dari Pembangunan ZI-nya

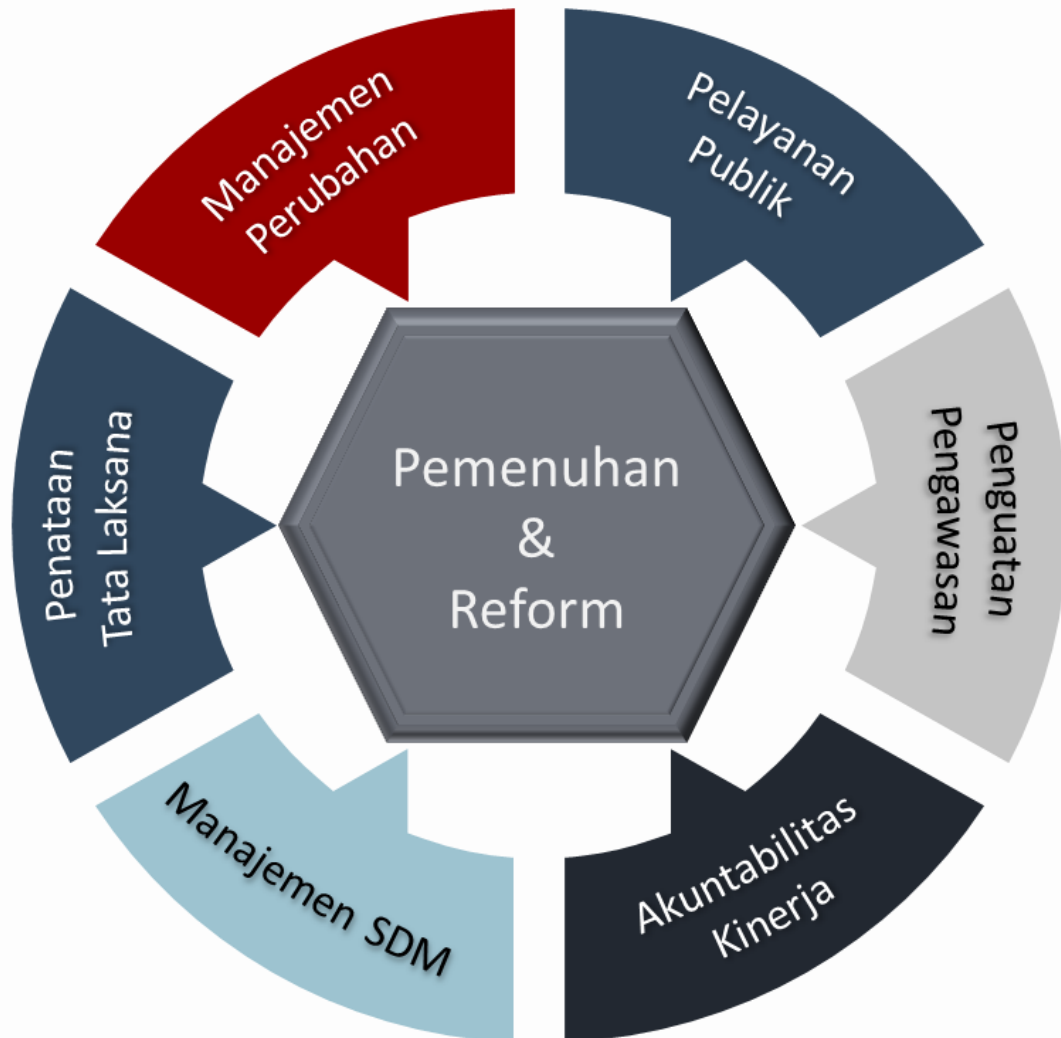
Kinerja belum menjadi dasar pembangunan Zona Integritas

Inovasi yang dibangun tidak sesuai/berdampak langsung pada kinerja, penguatan integritas, maupun dan kemudahan pelayanan

Zona Integritas dipandang sebagai proyek semata untuk mendapatkan predikat, sehingga upaya **continuous improvement** masih rendah



KOMPONEN PENGUNGKIT (60%)



KOMPONEN HASIL (40%)



**Pemerintahan
yang Bersih dan
Akuntabel**

1. Survey Persepsi Anti Korupsi
2. Capaian Kinerja



**Pelayanan Publik
yang Prima**

Survey persepsi
Pelayanan Publik

MANAJEMEN PERUBAHAN

1
5

TUJUAN

Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja;
- ☐ Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap Perubahan;
- ☐ Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak.

PEMENUHAN	REFORM
Tim Kerja ZI	Komitmen Dalam Perubahan
Rencana Pembangunan ZI	Komitmen Pimpinan
Pemantauan dan Evaluasi ZI	Membangun Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	

PENATAAN TATA LAKSANA

1
6

TUJUAN

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan;
- ☐ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan;
- ☐ Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

PEMENUHAN	REFORM
SOP Kegiatan Utama	Pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap peta proses bisnis
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
Keterbukaan Informasi Publik	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

PENATAAN MANAJEMEN SDM

1
7

C

TUJUAN

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur



KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
- ☐ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
- ☐ Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
- ☐ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
- ☐ Meningkatnya profesionalisme SDM.

PEMENUHAN	REFORM
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Kinerja Individu
Pola Mutasi Internal	<i>Assesment</i> Pegawai
Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	Pelanggaran dan Disiplin Pegawai
Penetapan Kinerja Individu	

PENGUATAN AKUNTABILITAS

1
8

TUJUAN

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- ☐ Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

PEMENUHAN	REFORM
Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya Capaian Kinerja
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pemberian <i>Reward & Punishment</i> atas dasar kinerja
	Kerangka Logis (penjabaran kinerja)

PENGUATAN PENGAWASAN

1
9

TUJUAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- ☐ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;
- ☐ Meningkatkan sistem integritas.

PEMENUHAN	REFORM
Gratifikasi	Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama
Penerapan SPIP	Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
<i>Whistle Blowing System</i>	
Penangan Benturan Kepentingan	

TUJUAN

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- ☐ Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional;
- ☐ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public.

PEMENUHAN	REFORM
Standar Pelayanan	Upaya dan/inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik
Budaya Pelayanan Prima	Upaya dan/atau inovasi pada perizinan/pelayanan telah dipermudah
Pengelolaan Pengaduan	Penanganan pengaduan pelayanan
Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan	
Peningkatan TI	

SPAK & SPKP

- Dilakukan terhadap **semua jenis layanan**
- Dilakukan kepada **seluruh penerima layanan**
- Diutamakan memanfaatkan media berbasis digital (memudahkan pengolahan dan pelaporan)
- Hasil survei → **IPAK dan IPKP dengan skala 4**

KOMPONEN HASIL (40%)



Pemerintahan
yang Bersih dan
Akuntabel

1. Survey Persepsi Anti Korupsi
2. Capaian Kinerja



Pelayanan Publik
yang Prima

Survey persepsi
Pelayanan Publik

PERTANYAAN MINIMAL PADA SURVEI

2
2

SPKP

1. Prosedur
2. Persyaratan
3. Biaya
4. Waktu
5. Penyelesaian
6. Respon
7. Performa
8. Sarana
9. Pengaduan

SPAK

1. Integritas
2. Tindakan Diskriminasi
3. Indikasi Kecurangan Pelayanan
4. Pemberian Imbalan di luar ketentuan yang berlaku
5. Praktik Pungutan Liar
6. Praktik Percaloan

PELAPORAN HASIL SURVEI MANDIRI

2
3

- Laporan hasil pelaksanaan survei mandiri merupakan **bukti dukung komponen** hasil
- Merupakan rata-rata IPAK dan IPKP minimal **3 (tiga) bulan terakhir sebelum** diusulkan ke TPN

Cth:

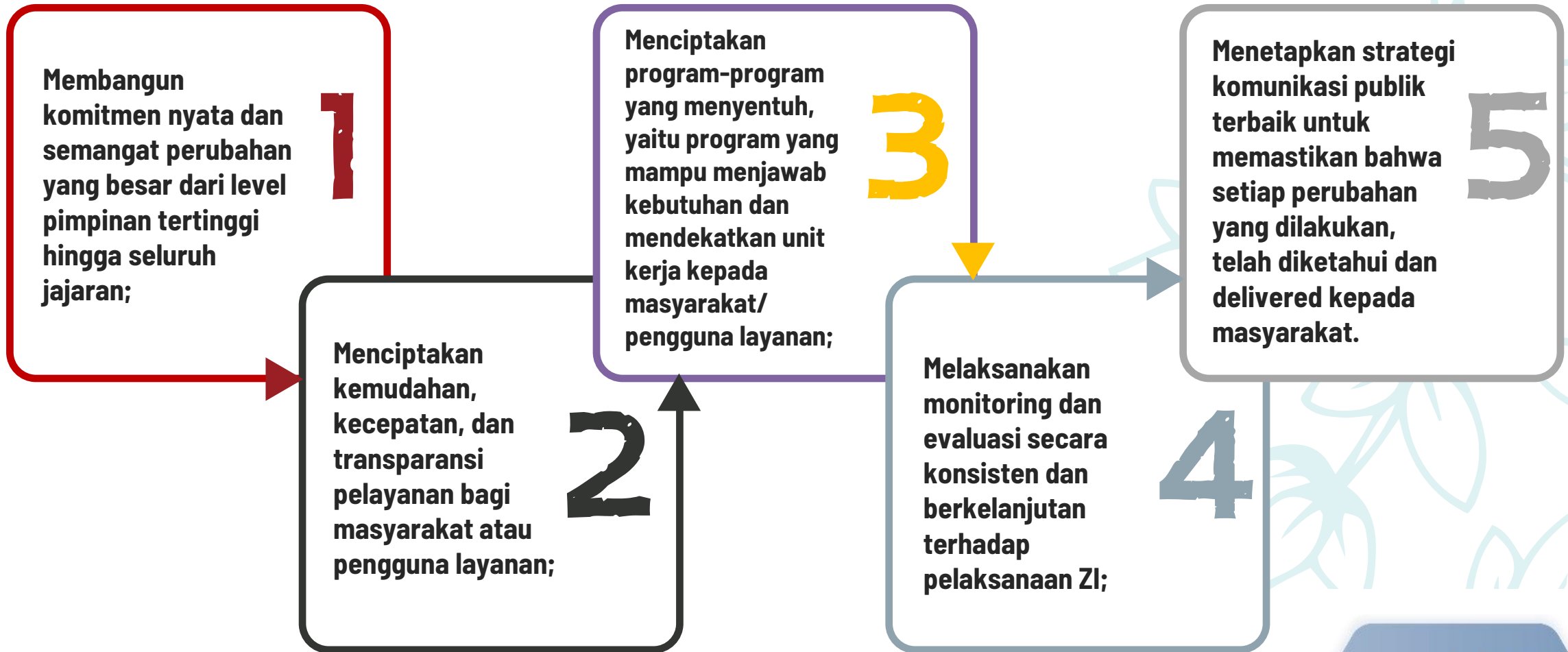


CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

Bab I	Kuesioner Survei Pada bab ini disajikan pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner survei
Bab II	Metodologi Survei A. Target Populasi B. Penentuan Sampel C. Metode Analisis D. Metode Pencacahan
Bab III	Pengolahan Survei A. Analisis Hasil Survei Pada sub bab ini diuraikan kelemahan dan kelebihan hasil survei yang telah dilakukan B. Tindak Lanjut Hasil Survei
Bab IV	Data Survei A. Data Responden Pada sub bab ini memuat minimal Nama dan Nomor Telepon B. Data Dukung Lainnya

STRATEGI PEMBANGUNAN ZI

2
4



TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI

2
5

Pencanangan

Kegiatan pencanangan merupakan langkah awal pembangunan zona integritas, namun tidak diwajibkan terdapat acara yang khusus/formal pada saat pencanangan, akan tetapi yang utama adalah penyebaran informasi terkait instansi/unit kerja sedang melakukan upaya peningkatan tata kelola serta kualitas pelayanan melalui pembangunan Zona Integritas.

Penetapan

Unit kerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi adalah unit kerja yang memenuhi kriteria antara lain:

Unit kerja yang melaksanakan layanan utama (core business) instansi pemerintah;

Unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;

Unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan

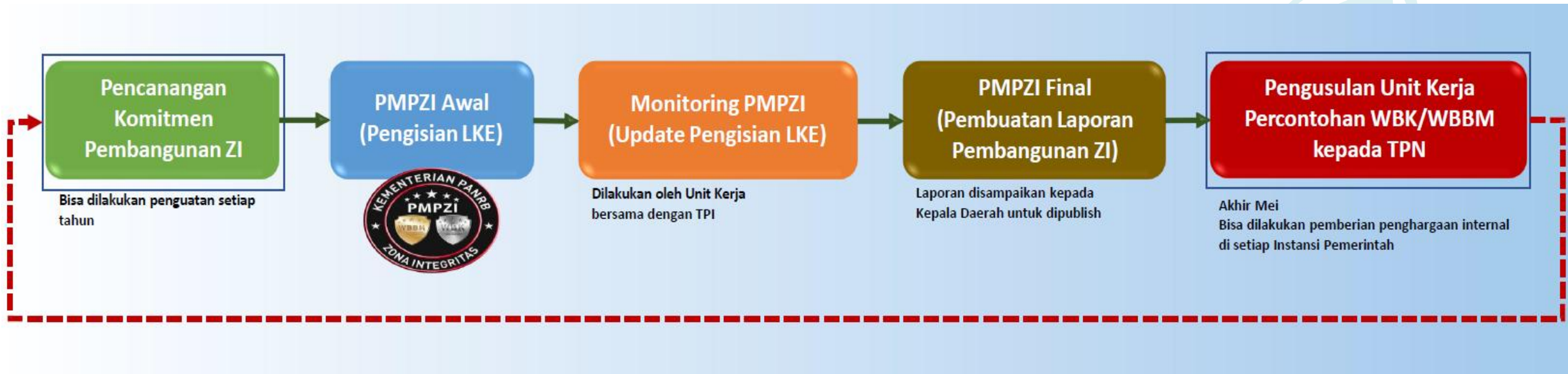
Unit kerja perlu melakukan penetapan program pembangunan Zona Integritas ini harus disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama unit kerja, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi oleh unit kerja. Lalu perlu disusun berbagai solusi yang inovatif sesuai prioritas atas permasalahan-permasalahan. Program-program kerja ini kemudian diselaraskan dengan enam area perubahan yang ada pada Zona Integritas.

Pemantauan pembangunan

Selama unit kerja membangun Zona Integritas di Internalnya masing-masing, maka perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

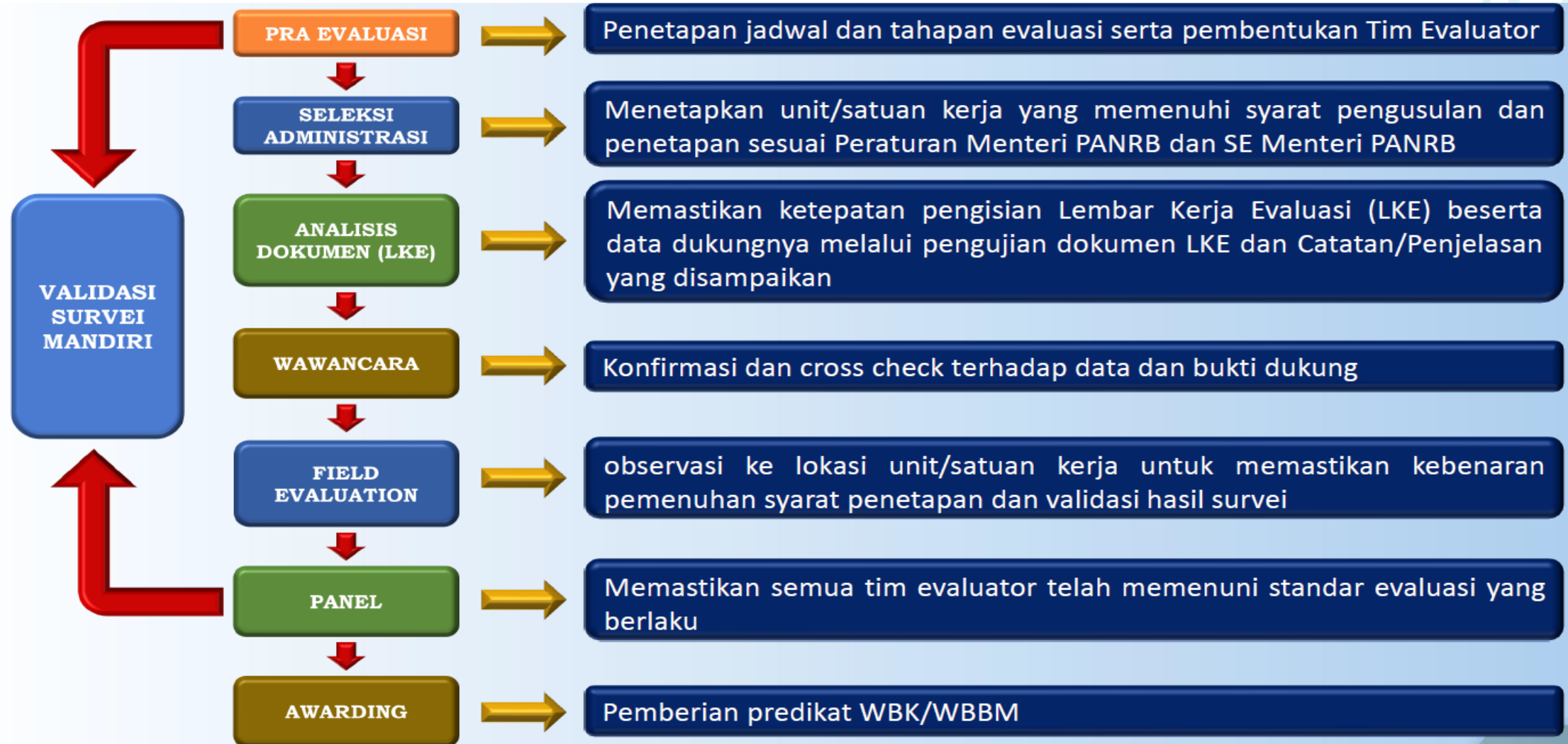
ALUR PEMBANGUNAN ZI DAN PENGUSULAN UNIT KERJA PERCONTOHAN WBK/WBBM

2
6



TAHAPAN EVALUASI ZI

2
7



PENYAMPAIAN HASIL PEMBANGUNAN ZI

2
8

Isu atau
Permasalahan yang
dihadapi Unit Kerja

Mitigasi Risiko yang
sudah dilaksanakan

Hasil Pencapaian
Kinerja

Kondisi dari Hasil
Perubahan pada 6
Area Perubahan

Inovasi atau Upaya
yang sudah
dilakukan dalam
mewujudkan Kinerja

DALAM PEMBANGUNAN ZI

Tempat konsultasi bagi
unit kerja/satker

Fasilitator dalam
pemberian asistensi
dan pendampingan ZI

DALAM EVALUASI PEMBANGUNAN ZI

Melakukan evaluasi
Internal

Memberikan
rekomendasi kepada
unit kerja

Melaporkan hasil
evaluasi kepada
pimpinan instansi

Melakukan pemantauan berkala
bagi unit yang telah mendapat
predikat WBK/WBBM

DALAM PEMANTAUAN BAGI UNIT KERJA YANG TELAH BERPREDIKAT WBK/WBBM

Melakukan
pendampingan berkala
bagi unit kerja

Melakukan survei
internal berkala

Melakukan evaluasi
internal berkala tiap 2
tahun sekali

Melakukan klarifikasi atas
aduan mal administrasi di
unit kerja



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMA KASIH

 @kempanrb

 @kemenpanrb

 [www .menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

  @Kementerian PANRB